

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Perkembangan usaha di zaman sekarang sudah sangat beragam. Keberagaman usaha tersebut menghasilkan beberapa jenis bentuk usaha, salah satunya yaitu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 bahwa UMKM adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang berdiri sendiri dan bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha besar.

Di Indonesia sendiri jumlah UMKM termasuk bentuk usaha yang paling banyak. Dengan banyaknya jumlah UMKM, pemerintah dapat memanfaatkan ini sebagai sarana untuk meningkatkan perekonomian Indonesia dengan cara menciptakan lapangan pekerjaan sehingga dapat membantu mengurangi jumlah pengangguran, mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, serta dapat membantu pemerataan pendapatan dalam masyarakat. Mengingat besarnya kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional, maka upaya peningkatan kinerja UMKM perlu dilakukan untuk menjaga stabilitas perekonomian secara nasional. Salah satu upaya tersebut adalah melalui penerapan dan penggunaan informasi akuntansi (Endiana & Sudiartana, 2016).

Penggunaan informasi akuntansi merupakan proses, cara, perbuatan menggunakan, dan pemakaian informasi akuntansi untuk pengambilan keputusan ekonomi dalam menentukan pilihan-pilihan diantara alternatif-alternatif tindakan (Wibowo & Kurniawati, 2015). Penggunaan informasi akuntansi di tengah semakin berkembangnya UMKM di Indonesia akan sangat berguna dan bermanfaat. Salah satu dari kegunaan tersebut adalah untuk membantu UMKM mengelola keuangannya secara efektif dengan menyediakan informasi untuk proses pengambilan kebijakan maupun pengambilan keputusan, seperti keputusan yang melibatkan perolehan modal atau pemanfaatan sumber pendanaan lainnya seperti pinjaman.

Namun faktanya, masih banyak pelaku UMKM mengalami beberapa faktor yang menyebabkan UMKM tidak berkembang. Menurut Nining I Soesilo, pendiri UKM Center Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, faktor-faktor tersebut antara lain karena kurangnya visi dan tujuan yang jelas tentang arah yang akan diambil oleh para pelaku usaha kemana akan membawa usahanya. Kemudian tidak ada pencatatan yang baik terutama mengenai arus kas. Jadi, karena sebagian besar keuangan rumah tangga dan dana usaha tercampur sehingga ketika penjualan bagus dan banyak tidak ada yang mengetahui ke mana perginya uang hasil penjualan tersebut. Terakhir yaitu sulitnya untuk mengakses permodalan. UMKM tidak memiliki fasilitas akses permodalan dan tidak memiliki kecakapan secara literasi dalam menggunakan produk keuangan seperti pinjaman, investasi, maupun tabungan sehingga dianggap tidak memenuhi kriteria serta persyaratan perbankan untuk mendapatkan kredit bagi perusahaan pembiayaan (Tribunnews.com, dikutip tanggal 2 Oktober 2018).

Masalah lainnya terkait keuangan adalah kurangnya pengetahuan mengenai informasi akuntansi dan pengetahuan mengenai pencatatan akuntansi sehingga dapat mengelola pencatatan keuangan yang baik serta pembukuan yang rapi (Merdeka.com, dikutip tanggal 23 Oktober 2018). Pengetahuan merupakan segala sesuatu yang diketahui, kepandaian, maupun segala sesuatu yang diketahui mengenai suatu hal (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Maka dari itu pengetahuan akuntansi merupakan segala sesuatu yang diketahui terkait akuntansi. Dengan memiliki pengetahuan mengenai akuntansi, pelaku usaha UMKM dapat mengetahui sehat atau tidaknya usaha yang sedang dijalankan (Merdeka.com, dikutip tanggal 23 Oktober 2018). Salah satu dampak yang dapat terjadi apabila pelaku usaha tidak memiliki pengetahuan akuntansi adalah usaha yang awalnya memiliki prospek bagus untuk berhasil dapat tiba-tiba menjadi bangkrut. Hal tersebut dikarenakan informasi-informasi dalam catatan akuntansi dapat dijadikan sebagai informasi untuk menganalisis permasalahan yang dihadapi sehingga pelaku usaha dapat mengambil keputusan yang tepat dan terhindar dari kebangkrutan.

Selain itu banyak pelaku UMKM yang mengalami masalah tentang permodalan dikarenakan kurangnya informasi atau tidak memiliki akses terhadap

perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya. Menurut Arianto (2009) terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab terhadap masalah ini, antara lain: (i) perbankan memandang UMKM kurang kredibel; (ii) beberapa dari UMKM sebenarnya layak untuk diberikan kredit tetapi tidak dapat diakses oleh bank; (iii) terjadinya asimetris informasi mengenai layanan perbankan dan lembaga keuangan lainnya yang dapat membantu UMKM; dan (iv) terbatasnya cakupan layanan perbankan. Adapun beberapa permasalahan lainnya yang sering dihadapi oleh para pelaku usaha UMKM antara lain persaingan usaha, pemasaran produk, penggunaan teknologi, kualitas sumber daya manusia yang rendah, dan pendampingan atau pelatihan bagi pelaku usaha. Pelatihan merupakan sebuah proses, cara, dan perbuatan yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

Masalah lainnya yang menjadi hambatan bagi UMKM di Indonesia untuk dapat maju adalah dari sisi sumber daya manusia. Menurut pengamat ekonomi Hendri Saparini, bahwa sebagian besar sumber daya manusia di sektor UMKM masih tergolong rendah yang rata-rata hanya sekolah dasar. Adapun persentase pelaku UMKM sebesar 51 persen tenaga kerja pendidikannya adalah sekolah dasar. Dengan tingkat pendidikan yang rendah, kemungkinan memiliki pengetahuan mengenai pentingnya pencatatan laporan keuangan pun dianggap masih rendah. Oleh karena itu, salah satu kunci utama untuk meningkatkan kualitas UMKM harus dimulai dari sisi sumber daya manusia yang kualitasnya terus ditingkatkan baik melalui pelatihan maupun melalui perekrutan karyawan secara selektif (Liputan6.com, dikutip tanggal 2 Oktober 2018).

Untuk dapat menghindari beberapa masalah yang terjadi dalam UMKM, para pelaku usaha sudah seharusnya lebih menyadari akan pentingnya penggunaan informasi akuntansi untuk pengelolaan keuangan yang lebih baik lagi. Selain itu para pelaku usaha dapat meningkatkan pengetahuan akuntansi serta kinerja melalui sebuah pelatihan, baik itu yang diadakan oleh pemerintah maupun oleh swasta.

Selama ini UMKM telah memberikan kontribusi sekitar 57-60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan sekitar 97 persen tingkat penyerapan tenaga kerja dari keseluruhan tenaga kerja nasional (Profil Bisnis UMKM oleh

LPPI dan BI tahun 2015). Selain itu, dalam lima tahun terakhir kontribusi UMKM terhadap PDB mengalami peningkatan dari 57,84 persen menjadi 60,34 persen. Begitu juga dengan tingkat penyerapan tenaga kerja mengalami peningkatan dari 96,99 persen menjadi 97,22 persen pada periode yang sama (Kamar Dagang Indonesia). UMKM juga memiliki peranan dalam ekspor dan investasi. Nilai ekspor non migas UMKM pada tahun 2015 mencapai Rp 192,5 triliun. Dibandingkan dengan tahun 2014 nilai ekspor mengalami peningkatan sebesar 3,5 persen. Namun demikian, menurut Menteri Koperasi dan UMKM dalam Renstra Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia (2015-2019) bahwa kinerja UMKM tersebut masih cukup bervariasi dari tahun ke tahun diakibatkan oleh tingkat pertumbuhan dari *output* UMKM yang cenderung berfluktuasi.

Persoalan klasik seputar pembiayaan dan pengembangan usaha masih tetap melekat pada UMKM. Pemerintah mencatat hanya 30% dari 56,4 juta UMKM di seluruh Indonesia yang mampu mengakses pembiayaan pada tahun 2014. Dari persentase tersebut, sebanyak 76,1% memperoleh kredit dari bank, sedangkan 23,9% sisanya diperoleh dari lembaga non-perbankan seperti koperasi yang menawarkan simpan pinjam. Dengan kata lain, sekitar 60%-70% dari keseluruhan sektor UMKM masih kekurangan akses terhadap pembiayaan berbasis perbankan (Profil Bisnis UMKM oleh LPPI dan BI tahun 2015).

Jumlah UMKM di Indonesia semakin hari terus mengalami peningkatan. Menurut informasi yang dihimpun dari Kementerian Koperasi dan UMKM Indonesia, jumlah UMKM pada tahun 2013 mencapai 57.895.721 unit. Pada tahun 2019 jumlah tersebut diperkirakan akan terus berkembang menjadi lebih dari 59.000.000 unit. Dengan semakin banyak dan berkembangnya jumlah UMKM di Indonesia, tentunya hal tersebut dapat juga menjadi tantangan bagi pelaku UMKM. Oleh karena itu, UMKM harus selalu meningkatkan kinerjanya. Salah satu kinerja yang perlu diperhatikan oleh para pelaku UMKM adalah bagaimana untuk dapat mempertahankan usaha dengan terus melakukan inovasi pembaharuan produk dan meningkatkan kualitas manajemen pada usahanya sehingga mampu bersaing dengan pesaing lainnya.

Fenomena serupa mengenai perkembangan jumlah UMKM juga terjadi di Kabupaten Ciamis. Pada tahun 2015, jumlah UMKM yang terdapat di Kabupaten Ciamis yaitu sebanyak 14.311 unit. Data disajikan pada tabel 1.1.

**Tabel 1.1**

**Data Usaha Mikro Kecil Dan Menengah ( UMKM )**

**Kabupaten Ciamis Tahun 2015**

No	Jenis	Jumlah UMKM	Tenaga Kerja	Asset (Rp.000)	Omzet (Rp.000)
1	Mikro	13.955	29.291	401.730.006	425.188.239
2	Kecil	333	2.422	70.213.632	207.658.070
3	Menengah	23	241	15.042.575	82.545.775
<b>Total</b>		14.311	31.974	486.986.213	715.392.084

Sumber : Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Ciamis (Data diolah)

Dari data di atas dapat dilihat bahwa terdapat 14.311 unit UMKM dengan jumlah dan jenis yang berbeda-beda. Jumlah tersebut terdiri dari jenis usaha mikro sebanyak 13.955 unit, usaha kecil sebanyak 333 unit, dan usaha menengah sebanyak 23 unit. Pada tahun tersebut, UMKM juga dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 31.954 orang dengan jumlah asset sebesar Rp 468.806.213 dan omzet yang dihasilkan sebesar Rp 715.391.

Selain itu, perkembangan jumlah UMKM di Kabupaten Ciamis mengalami kenaikan dari tahun 2015-2017. Kenaikan jumlah tersebut disajikan pada tabel di bawah 1.2.

**Tabel 1.2**

**Capaian Indikator Usaha Mikro Kecil dan Menengah Di Kabupaten Ciamis**

**Tahun 2014-2017**

No	Indikator	Tahun			Satuan
		2015	2016	2017	
1	Jumlah UMKM	14,311	15,545	15,567	Unit
2	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	97,51	87,68	99,85	Persen

Sumber : Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Ciamis (Data diolah)

Bedasarkan dari data di atas, pada tahun 2015 jumlah UMKM yang terdapat di Kabupaten Ciamis yaitu sebanyak 14.311 unit dengan persentase usaha mikro dan kecil sebesar 97,51 persen. Pada tahun 2016 jumlah UMKM menjadi 15.545 unit, dengan persentase usaha mikro dan kecil hanya sebesar 87,68 persen. Kenaikan jumlah UMKM di 2016 yaitu sebanyak 1.234 atau meningkat sebesar 8,6 persen dibandingkan tahun 2015. Berbeda dengan jumlah UMKM yang mengalami kenaikan, persentase untuk usaha mikro dan kecil pada tahun 2016 justru mengalami penurunan sebesar 9,83 persen. Pada tahun 2017 jumlah tersebut menjadi 15.567 unit dengan persentase 99,85 persen. Terjadi kenaikan hanya sebanyak 22 unit atau 0,14 persen dari tahun sebelumnya. Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa kenaikan jumlah UMKM yang paling besar yaitu terjadi dari tahun 2015 sampai 2016 dengan kenaikan sebesar 8,6 persen dan kenaikan yang paling kecil terjadi dari tahun 2016 sampai 2017 dengan kenaikan hanya 22 unit UMKM atau sebesar 0,1 persen saja.

Namun, dengan adanya peningkatan jumlah UMKM tersebut ternyata tidak diikuti dengan peningkatan kualitas UMKM itu sendiri atau bisa dibilang perkembangan UMKM tersebut masih jalan di tempat. Salah satu contohnya yaitu pada UMKM produk makanan ringan dan kerajinan khas Kabupaten Ciamis yang menghasilkan produk cukup banyak, tetapi produk tersebut masih kalah bersaing dengan produk dari daerah lain. Kurangnya pemahaman dan pengetahuan mengenai akuntansi para pelaku UMKM mengenai pengelolaan keuangan dan rendahnya kreativitas sumber daya manusia pelaku UMKM di Ciamis dalam mengembangkan usahanya dapat dilihat dalam hal pengemasan hasil produksi, promosi hingga pemasaran (Koran Sindo, dikutip tanggal 23 September 2018). Meskipun pada tahun ke tahun mengalami kenaikan jumlah UMKM, tetapi berdasarkan hasil pendaftaran (listing) usaha/perusahaan sensus ekonomi pada tahun 2016, Kabupaten Ciamis berada di peringkat sepuluh terbawah jumlah usaha menurut kabupaten/kota dan skala usaha di Jawa Barat. Menurut sensus, jumlah keseluruhan Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Usaha Menengah Besar (UMB) Kabupaten Ciamis pada tahun 2016 adalah sebanyak 139.719 unit. Data disajikan pada tabel 1.3.

**Tabel 1.3**  
**Jumlah Usaha Menurut Kabupaten/Kota dan Skala Usaha di Jawa Barat**  
**Tahun 2016**

No	Kabupaten/Kota	UMK	UMB	Jumlah	Proporsi (%)
1.	Kota Banjar	25.553	343	25.986	0,56
2.	Kota Sukabumi	39.059	923	39.982	0,86
3.	Kota Cirebon	38.799	1.425	40.224	0,87
4.	Kota Cimahi	55.851	1.059	56.910	1,23
5.	Pangandaran	59.990	303	60.293	1,30
6.	Kota Bogor	83.515	2.891	86.406	1,86
7.	Purwakarta	85.745	1.501	87.246	1,88
8.	Kota Tasikmalaya	89.488	1.625	93.113	1,97
9.	Kuningan	94.090	795	94.885	2,05
10.	Ciamis	138.877	842	139.719	3,01

Sumber : Bps.go.id (Data Diolah)

Jarangnya pengadaan kegiatan pendampingan dan pelatihan akuntansi bagi para pelaku UMKM di Ciamis serta rendahnya minat pelaku UMKM untuk mengikuti kegiatan pelatihan tersebut menjadi salah satu penghambat akan majunya perkembangan UMKM. Kegiatan pendampingan dan pelatihan yang diadakan oleh pemerintah maupun swasta dapat menjadi sarana bagi UMKM untuk mengembangkan usahanya, sehingga terdapat kesinambungan antara pelaku UMKM dengan pemerintah yang tentunya bisa menjadi aset positif bagi pemerintah Kabupaten Ciamis untuk kedepannya (Konten Indonesia.com, dikutip tanggal 2 Oktober 2018).

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk meneliti hal-hal yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan informasi akuntansi. Beberapa penelitian mengenai hubungan pengetahuan, dan pelatihan akuntansi telah dilakukan. Namun, penelitian-penelitian terdahulu memiliki hasil yang bervariasi.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Enung Nurhayati dan Lia Dwi Martika (2015) tentang Pengaruh Pengetahuan Akuntansi dan Skala Usaha Terhadap Penggunaan Informasi Akuntansi Pada Usaha Kecil Menengah (UKM) Di Kabupaten Kuningan menunjukkan hasil yang positif. Pengetahuan akuntansi yang dimiliki oleh para pelaku UKM dapat ditingkatkan dan digunakan dengan baik, maka penggunaan informasi akuntansi juga akan meningkat. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Dwi Lestanti (2015) tentang Pengaruh Pengetahuan Akuntansi, Pengalaman Usaha, Dan Motivasi Kerja Terhadap Persepsi Penggunaan Informasi Akuntansi Pada Pelaku UMKM Di Boyolali bahwa pengetahuan akuntansi berpengaruh terhadap penggunaan informasi pada pelaku UMKM di Boyolali.

Penelitian yang dilakukan oleh Aprilia Whetyningtyas (2016) tentang Determinan Penggunaan Informasi Akuntansi Pada Usaha Kecil Menengah (UKM) menyatakan bahwa pelatihan akuntansi pada pelaku UMKM dapat berpengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi. Pemilik usaha kecil dan menengah yang sering mengikuti pelatihan akuntansi dapat mendorong pemilik untuk menggunakan informasi akuntansi dalam membuat keputusan bisnis yang tepat. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Yeti Apriliawati dan Hastuti (2011) dengan judul Identifikasi Faktor Penggunaan Informasi Akuntansi Pada Perusahaan Kecil Di Kota Bandung yang menyatakan bahwa pelatihan akuntansi memiliki pengaruh yang lemah terhadap penggunaan informasi akuntansi.

Dalam penelitian ini, terdapat perbedaan dari penelitian terdahulu. Peneliti menggabungkan variabel pengetahuan dan pelatihan akuntansi secara bersama-sama terhadap penggunaan informasi akuntansi. Selain itu peneliti ingin mengetahui apakah dengan penggunaan teori yang sama tetapi dengan subjek dan waktu yang berbeda akan menunjukkan hasil yang sama atau berbeda. Pemilihan subjek yang dipilih dalam penelitian ini adalah usaha mikro kecil dan menengah di Kabupaten Ciamis dengan sampel usaha kecil dan menengah. Alasan dipilihnya sampel tersebut, karena terdapat variabel pengetahuan akuntansi dan penggunaan informasi akuntansi. Maka, pemilihan sampelnya ditujukan untuk jenis usaha yang dianggap sudah mengerti akuntansi dan sudah melakukan pencatatan akuntansi.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti menganggap bahwa penelitian ini perlu dilakukan kembali melihat hasil dari penelitian sebelumnya yang bervariasi. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pengetahuan dan Pelatihan Akuntansi Terhadap Penggunaan Informasi Akuntansi Pada UMKM di Kabupaten Ciamis”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan akuntansi memiliki pengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi?
2. Apakah pelatihan akuntansi memiliki pengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi?
3. Apakah pengetahuan dan pelatihan akuntansi memiliki pengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh pengetahuan akuntansi terhadap penggunaan informasi akuntansi.
2. Pengaruh pelatihan akuntansi terhadap penggunaan informasi akuntansi.
3. Pengaruh pengetahuan dan pelatihan akuntansi terhadap penggunaan informasi akuntansi.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain:

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa pemikiran, teori, dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi, khususnya dalam kajian penggunaan informasi akuntansi bagi para pelaku UMKM.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi UMKM**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber untuk menambah informasi bagi para pelaku UMKM. Selain itu hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran mengenai besarnya manfaat mengenai penggunaan informasi akuntansi sebagai bahan pertimbangan serta masukan bagi UMKM untuk meningkatkan kinerja terutama dalam mengambil keputusan ataupun kebijakan yang tepat untuk memajukan usahanya.

#### **b. Bagi Pemerintah**

Dapat dijadikan sebagai masukan dan gambaran juga sumber informasi dalam menentukan kebijakan maupun strategi terkait dalam bidang UMKM, serta dapat dijadikan sebagai bahan dalam menentukan solusi terhadap masalah demi tercapainya peningkatan kualitas UMKM.

#### **c. Bagi Pihak Lain**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan manfaat sebagai bahan referensi atau rujukan maupun sumber informasi untuk penelitian selanjutnya mengenai masalah serupa di masa yang akan datang.